

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang sangat penting karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Di Indonesia, inflasi sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan Bank Indonesia, terutama karena sejarah panjang fluktuasi harga yang tidak terkendali, yang berdampak besar pada perekonomian nasional. (Maipita, 2020) menyatakan bahwa hampir dari seluruh negara berkembang mengalami persoalan tentang tingginya tingkat pengangguran dan inflasi. Perubahan tingkat inflasi di Indonesia sudah menjadi kenyataan dan berdampak pada daya beli masyarakat. Sebagai fenomena ekonomi, inflasi telah menjadi komponen penting dalam perkembangan ekonomi negara (Christianingrum & Syafri, 2019). Salah satu tujuan utama dari kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi.

Dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, otoritas moneter terutama bank sentral, memiliki peran penting untuk menjaga tingkat inflasi tetap rendah dan stabil, kredibilitas kebijakan moneter sangat penting dalam menentukan keberhasilannya melalui berbagai instrumen kebijakan moneter (Dede Ruslan et al., 2024). Salah satu strategi utama yang digunakan adalah *inflation targeting*, di mana bank sentral menetapkan target inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Instrumen

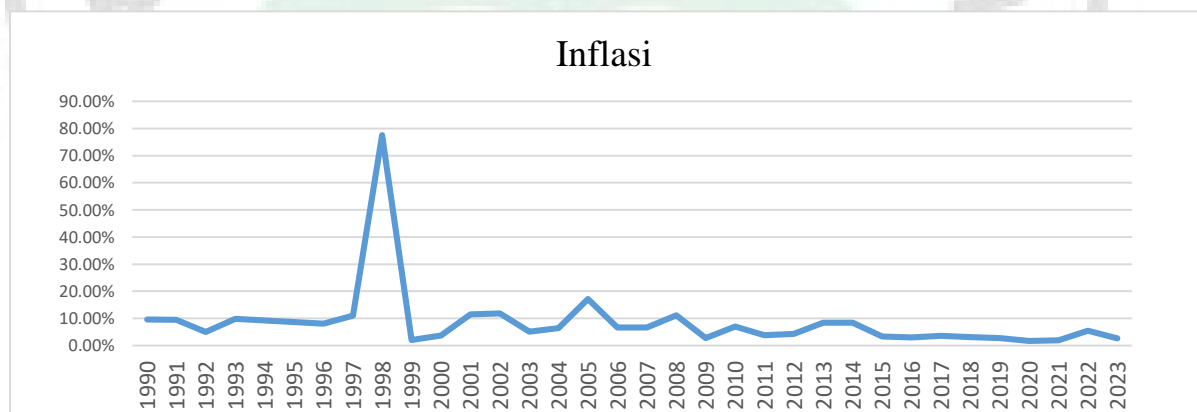
yang digunakan meliputi kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Ketika inflasi meningkat, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi konsumsi dan investasi, sementara jika ekonomi melambat, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, bank sentral juga mengawasi nilai tukar mata uang, karena fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi inflasi melalui harga barang impor. Kredibilitas kebijakan moneter sangat penting dalam membentuk ekspektasi inflasi masyarakat, sehingga bank sentral harus konsisten dalam mengambil langkah - langkah yang dapat menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Bank Indonesia menerapkan berbagai instrumen kebijakan moneter melalui instrumen seperti nilai tukar, Operasi Pasar Terbuka (OPT), suku bunga acuan (*BI 7-Day Reverse Repo Rate*), dan Cadangan Wajib Minimum (GWM), yang semuanya bertujuan mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian dan mengontrol ekspektasi inflasi masyarakat. **Teori Moneteris** menjelaskan bahwa jumlah uang yang beredar dalam perekonomian sangat berpengaruh terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. **Milton Friedman** mengungkapkan bahwa "**inflasi selalu merupakan fenomena moneter**", yang berarti inflasi terjadi ketika uang beredar meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. Jika terlalu banyak uang beredar, daya beli masyarakat naik, permintaan meningkat, dan harga - harga ikut melonjak. Sebaliknya, jika uang beredar terlalu sedikit, ekonomi bisa melambat hingga mengalami deflasi. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya kebijakan moneter yang cermat, seperti pengendalian suku bunga dan jumlah uang beredar, agar inflasi tetap terkendali dan ekonomi tetap stabil.

Krisis moneter tahun 1998, yang menyebabkan inflasi melonjak hingga lebih dari 70%, merupakan salah satu peristiwa inflasi paling signifikan dalam

sejarah Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ditengah persaingan internasional perekonomian Indonesia mengalami naik turun yang sulit dikendalikan. Ketidakpastian perekonomian tercermin dari laju inflasi, dimana kenaikan harga – harga secara keseluruhan terus meningkat dan sulit dikendalikan. Sebagaimana dinyatakan oleh (N. Gregory Mankiw, 2004), inflasi adalah fenomena moneter yang dapat merusak perekonomian secara signifikan. Krisis ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan moneter yang efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah penurunan daya beli masyarakat, penurunan investasi, serta melemahnya pertumbuhan ekonomi. Perhatikan grafik berikut :

Gambar 1.1 Grafik Inflasi Indonesia Tahun 1990 - 2023



Sumber data : SEKI Bank Indonesia, 2024

Melalui gambar grafik 1.1 dapat dilihat bahwasannya Inflasi di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2023 tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, tetapi juga erat kaitannya dengan beberapa faktor kunci seperti krisis moneter, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga. Pada awal 1990-an, inflasi relatif stabil, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kebijakan moneter yang terkontrol. Namun, krisis moneter Asia pada tahun 1997 - 1998 menjadi titik balik yang drastis, di mana inflasi melonjak hingga sekitar 77.6% pada tahun 1998. Krisis ini dipicu oleh anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar

AS akibat arus modal keluar besar - besaran dan hilangnya kepercayaan investor, yang kemudian menyebabkan lonjakan harga barang impor.

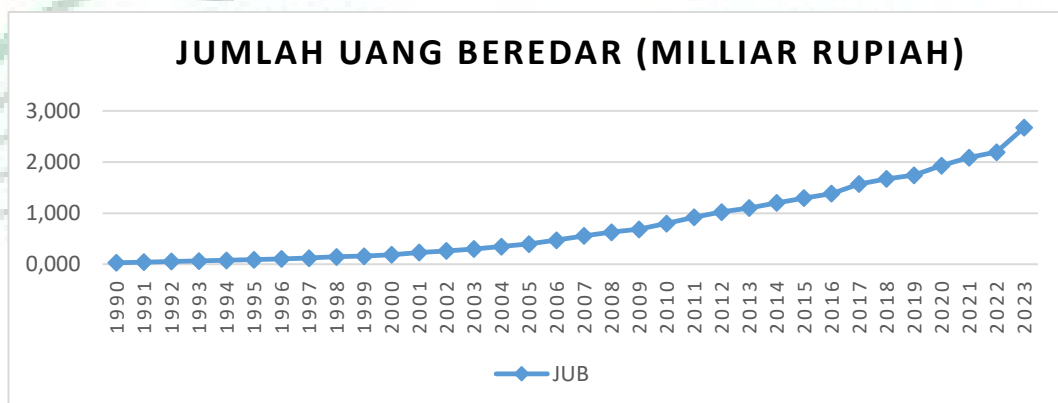
Selain itu, meningkatnya jumlah uang beredar selama krisis, baik melalui intervensi pemerintah untuk menyelamatkan sektor perbankan maupun kebijakan moneter yang kurang efektif, semakin memperburuk inflasi. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan depresiasi nilai tukar juga berkontribusi pada kenaikan biaya produksi dan harga barang. Tingkat suku bunga yang dinaikkan secara signifikan untuk menahan laju depresiasi rupiah malah memperparah kontraksi ekonomi, memperburuk kondisi likuiditas, dan menciptakan lingkaran inflasi yang sulit dikendalikan.

Memasuki dekade 2000-an, pemerintah Indonesia berupaya memulihkan stabilitas ekonomi dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang lebih ketat. Reformasi ini berhasil menurunkan inflasi secara bertahap, meskipun tantangan seperti kenaikan harga minyak dunia dan penyesuaian harga bahan bakar bersubsidi tetap memicu lonjakan inflasi sementara. Tingkat suku bunga dijaga agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memicu inflasi berlebihan.

Pada dekade 2010-an, inflasi terus stabil di kisaran 3-8%, dengan Bank Indonesia menerapkan kebijakan suku bunga yang lebih fleksibel serta menjaga jumlah uang beredar sesuai kebutuhan ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan inflasi ke tingkat yang sangat rendah karena menurunnya permintaan dan terganggunya rantai pasokan global. Pemerintah merespons dengan menambah jumlah uang beredar dan menurunkan suku bunga untuk mendukung pemulihan ekonomi.

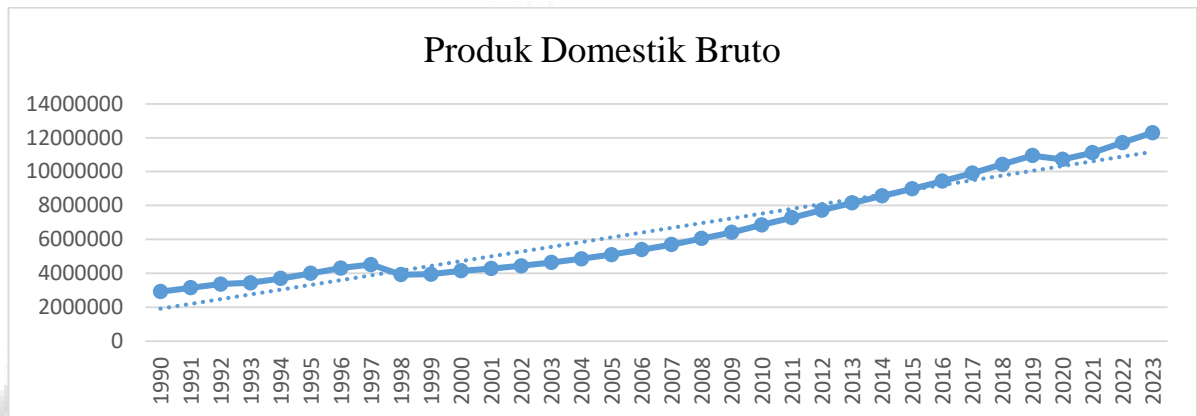
Setelah pandemi, inflasi mulai meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022, didorong oleh kenaikan harga komoditas global dan gangguan pada rantai pasokan. Menurut (Rahardja, P., & Manurung, 2008) jumlah uang beredar adalah total jumlah uang yang beredar di masyarakat mencerminkan nilai keseluruhan uang yang tersedia untuk transaksi. Dalam definisi yang lebih sempit (*narrow money*), uang beredar terdiri dari uang kartal, seperti uang kertas dan koin, serta uang giral yang tersimpan dalam rekening giro di bank. Berdasarkan hasil penelitian (Arjunita, 2016) menyatakan bahwa variabel jumlah uang beredar dan suku bunga mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia. Jumlah uang beredar adalah salah satu indikator penting dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi ketersediaan uang dalam perekonomian. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, daya beli masyarakat biasanya juga meningkat, yang dapat mendorong permintaan barang dan jasa serta berpotensi memicu inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang beredar dikurangi, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena likuiditas yang terbatas dalam sistem keuangan.

Gambar 1.2 Grafik Jumlah Uang Beredar (Miliar Rupiah) Indonesia Tahun 1990 – 2023



Sumber data : SEKI Bank Indonesia, 2024

Gambar 1.3 Grafik PDB (Miliar Rupiah) Indonesia Tahun 1990 – 2023



Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2024

Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memiliki keterkaitan erat dengan inflasi serta Produk Domestik Bruto (PDB). Secara umum, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian berperan penting dalam menentukan tingkat inflasi dan aktivitas ekonomi. **Teori Kuantitas Uang** menjelaskan bahwa semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, semakin tinggi pula harga barang dan jasa jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan *output riil* (PDB). Namun, jika pertumbuhan ekonomi seimbang dengan jumlah uang beredar atau jika masyarakat lebih memilih menabung, harga - harga bisa tetap stabil. Selain itu, inflasi juga bergantung pada ketersediaan barang, kebijakan suku bunga, serta kondisi global seperti harga minyak dan situasi geopolitik. Dengan demikian, meskipun uang yang beredar bertambah, tidak selalu berarti inflasi akan langsung meningkat, terutama jika pertumbuhan ekonomi mampu mengimbangi likuiditas yang tersedia.

Fenomena yang terjadi pada awal 1990-an hingga 1997 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar mengalami pertumbuhan yang stabil, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada periode ini, ekspansi ekonomi yang sehat menjaga keseimbangan antara peningkatan jumlah uang beredar dan pertumbuhan

PDB, sehingga inflasi tetap terkendali. Namun, krisis keuangan Asia pada tahun 1998 menyebabkan depresiasi tajam nilai tukar rupiah, lonjakan inflasi hingga lebih dari 70%, serta krisis likuiditas yang memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moneter ekspansif guna mengatasi dampak krisis. Peningkatan jumlah uang beredar pada periode ini lebih banyak digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan yang terguncang, tetapi karena pertumbuhan ekonomi berkontraksi tajam, dampaknya lebih terlihat pada lonjakan inflasi dan ketidakstabilan harga.

Setelah memasuki tahun 2000-an, jumlah uang beredar terus meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi. Pada periode 2005 – 2008, pertumbuhan jumlah uang beredar semakin cepat, didorong oleh ekspansi kredit dan investasi yang turut mendorong pertumbuhan PDB. Namun, krisis keuangan global pada tahun 2008 menyebabkan kenaikan harga komoditas yang memicu inflasi. Untuk mengatasi situasi tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat guna menjaga stabilitas harga dan mengontrol jumlah uang beredar. Pengendalian jumlah uang beredar dalam konteks ini bertujuan untuk menghindari overheating ekonomi yang dapat memicu lonjakan inflasi lebih lanjut.

Selama dekade 2010-an, jumlah uang beredar tetap meningkat secara konsisten, tetapi inflasi lebih terkendali dibandingkan dekade sebelumnya, dengan kisaran antara 3–6% per tahun. **Teori Kuantitas Uang** dari *Irving Fisher* menjelaskan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, tetapi juga oleh kecepatan peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah uang beredar meningkat tetapi sejalan dengan pertumbuhan PDB, maka tekanan inflasi dapat diminimalkan. Selain itu, menurut **Teori Ekspektasi Rasional** dari Robert Lucas, kebijakan moneter yang kredibel dapat menjaga stabilitas harga. Bank Indonesia berhasil mengelola likuiditas melalui suku bunga dan operasi pasar

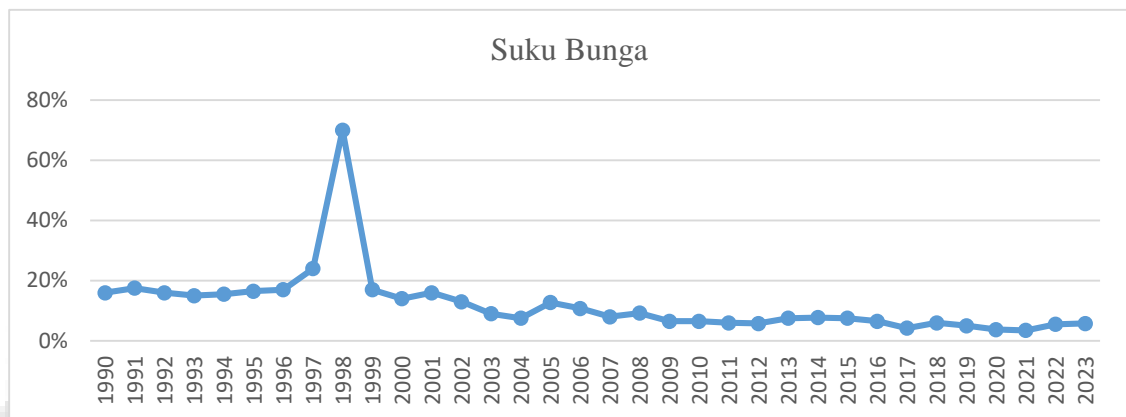
terbuka, sementara stabilitas harga komoditas global turut meredam tekanan inflasi. Kombinasi faktor-faktor ini membuat inflasi tetap stabil meskipun jumlah uang beredar terus bertambah, menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan cukup efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Namun, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 mengubah tren ini secara drastis. Pemerintah menerapkan stimulus besar - besaran untuk mendorong pemulihan ekonomi, sehingga jumlah uang beredar melonjak. Pada awal pandemi, inflasi masih rendah karena lemahnya permintaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Namun, pada 2021 dan 2022, inflasi mulai meningkat akibat gangguan rantai pasokan global serta kenaikan harga energi dan pangan. Pada saat yang sama, meskipun jumlah uang beredar bertambah, PDB mengalami kontraksi pada 2020 sebelum akhirnya mulai pulih pada tahun - tahun berikutnya. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan jumlah uang beredar tidak diiringi dengan peningkatan PDB, tekanan inflasi akan lebih terasa, terutama jika terjadi gangguan dari faktor eksternal.

Pada tahun 2023, jumlah uang beredar mencapai Rp2.675 triliun, mencerminkan pemulihan ekonomi pascapandemi. Namun, peningkatan jumlah uang beredar tetap diawasi dengan kebijakan moneter yang lebih ketat, termasuk kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi yang sempat melonjak pada 2022. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa lonjakan jumlah uang beredar sering kali diikuti oleh peningkatan inflasi, terutama dalam situasi krisis atau kebijakan stimulus besar-besaran. Namun, efektivitas pengendalian inflasi sangat bergantung pada kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, serta stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam jangka panjang, keseimbangan antara jumlah uang beredar dan pertumbuhan

PDB menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain jumlah uang beredar, suku bunga juga berperan penting dalam memengaruhi inflasi dan PDB. Hal ini dijelaskan melalui **Taylor Rule**, yang diperkenalkan oleh John B. Taylor (1993). Teori ini menekankan bahwa bank sentral harus menyesuaikan suku bunga berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga stabilitas harga. Suku bunga adalah faktor penting dalam perekonomian yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Karena pengaruhnya yang luas, perubahan suku bunga selalu diawasi dengan cermat. Suku bunga berperan dalam menentukan kondisi pasar keuangan, seperti pasar uang dan pasar modal (Luhfiana et al., 2022). Biasanya, suku bunga dinyatakan dalam persentase tahunan dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang dipinjam oleh masyarakat. Kebijakan suku bunga mencerminkan arah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Biasanya, Bank Indonesia akan menaikkan **BI Rate** jika inflasi diperkirakan melebihi target yang telah ditetapkan, dan sebaliknya, akan menurunkannya jika inflasi diprediksi berada di bawah sasaran (Bank Indonesia, 2015). Pemerintah mengatur tingkat suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan ini penting karena suku bunga berpengaruh langsung terhadap keputusan investasi. Para investor cenderung mencari imbal hasil yang lebih tinggi, sehingga perubahan suku bunga dapat memengaruhi aliran investasi di dalam negeri. Selain itu, kenaikan suku bunga merupakan salah satu langkah utama yang digunakan bank sentral untuk menekan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB).

Gambar 1.4 Grafik Suku Bunga (Persen) Indonesia Tahun 1990 – 2023

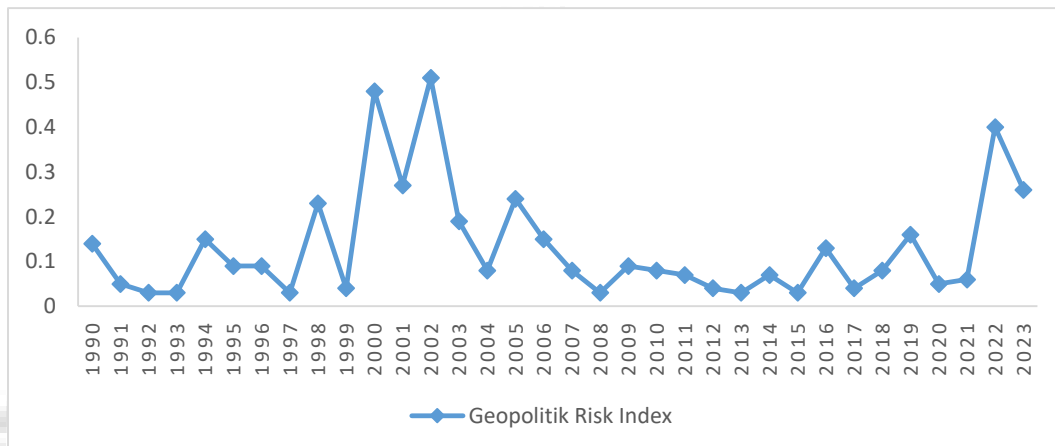
Sumber data : SEKI Bank Indonesia, 2024

Teori **Fisher Effect** menjelaskan bahwa ketika inflasi naik, suku bunga nominal juga akan meningkat agar suku bunga riil tetap stabil. Konsep ini dirangkum dalam rumus $i = r + \pi^e$, di mana suku bunga nominal merupakan gabungan dari suku bunga riil dan ekspektasi inflasi. Dengan kata lain, jika inflasi bertambah, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan ekonomi. Fluktuasi suku bunga di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2023 sangat erat kaitannya dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dalam upaya mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Pada awal 1990-an, suku bunga ditetapkan pada tingkat moderat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan inflasi yang relatif terkendali. Namun, selama Krisis Finansial Asia 1997 - 1998, inflasi melonjak tajam akibat depresiasi rupiah, dan BI merespons dengan menaikkan suku bunga hingga lebih dari 70% untuk menstabilkan nilai tukar dan meredam tekanan inflasi. Setelah krisis, suku bunga diturunkan secara bertahap selama periode 1999 - 2005 seiring dengan inflasi yang mulai terkendali dan stabilitas ekonomi yang pulih, ditandai dengan diperkenalkannya BI Rate sebagai acuan kebijakan moneter pada tahun 2005.

Pada tahun 2008 dunia mengalami **Krisis Keuangan Global** (*Global Financial Crisis/GFC*) yang dipicu oleh **krisis subprime mortgage** di Amerika Serikat. Dampak dari krisis ini meluas ke seluruh dunia menyebabkan kebangkrutan **Lehman Brothers**, salah satu bank investasi terbesar di AS, serta memicu kepanikan di pasar keuangan global termasuk Indonesia. Akibatnya, BI menaikkan suku bunga menjadi 9.5%, untuk meredam tekanan inflasi yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Namun, ketika tekanan inflasi mereda, BI menurunkan suku bunga untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pada 2013, kebijakan tapering oleh *Federal Reserve AS* memicu arus keluar modal dan melemahkan rupiah, yang meningkatkan risiko inflasi impor. Untuk menjaga stabilitas, BI menaikkan suku bunga menjadi 7.5%. Ketika harga komoditas global menurun pada 2015, inflasi relatif terkendali, dan BI kembali menurunkan suku bunga guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Saat pandemi COVID-19 melanda pada 2020, BI menurunkan suku bunga ke level terendah sepanjang sejarah, yaitu 3.5%, sebagai bagian dari kebijakan moneter akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, mulai tahun 2022, inflasi global yang meningkat akibat gangguan rantai pasokan dan ketegangan geopolitik, bersama dengan pengetatan kebijakan moneter di negara - negara maju, memaksa BI menaikkan suku bunga secara bertahap hingga 5.75% pada akhir 2023. Dengan demikian, kebijakan moneter yang diterapkan oleh BI secara konsisten menyesuaikan suku bunga sebagai instrumen utama untuk mengelola inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Gambar 1.5 Grafik Ketidakstabilan Geopolitik Indonesia Tahun 1990 - 2023



Sumber : Makromikro Data, 2024

Ketidakstabilan geopolitik adalah kondisi di mana suatu negara atau wilayah mengalami ketidakpastian akibat faktor politik, ekonomi, atau sosial yang berkaitan dengan hubungan internasional. Hal ini dapat disebabkan oleh konflik bersenjata, ketegangan diplomatik, perubahan rezim, sanksi ekonomi, atau peristiwa global lainnya yang memengaruhi stabilitas suatu negara. Ketidakstabilan geopolitik sering berdampak pada pasar keuangan, investasi, perdagangan, dan kebijakan ekonomi, sehingga dapat memicu risiko bagi perekonomian global maupun domestik. Indeks ketidakstabilan geopolitik diukur berdasarkan faktor seperti konflik bersenjata, ketegangan diplomatik, sanksi ekonomi, dan risiko politik yang memengaruhi stabilitas global dalam satuan indeks antara 0 - 1.

Indikator utama mencakup Indeks Ketidakpastian Kebijakan Ekonomi (EPU), volatilitas pasar keuangan (VIX), serta perubahan harga komoditas strategis seperti minyak (Caldara, D., & Iacoviello, 2022). Indeks ini merupakan ukuran aktivitas bulanan yang dihitung berdasarkan peristiwa geopolitik dalam tahun tertentu (Sumarjo, C., Mangantar, M., & Rumokoy, 2022).

Ketidakstabilan geopolitik domestik dan internasional memengaruhi dinamika inflasi Indonesia dari tahun 1990 hingga 2023. Sebagai negara yang

bergantung pada impor minyak, Indonesia mengalami kenaikan biaya energi yang berdampak langsung pada inflasi, terutama di bidang transportasi, manufaktur, dan barang kebutuhan pokok. Pada awal 1990-an, Perang Teluk (1990 - 1991) menyebabkan gejolak di pasar minyak global, dengan kenaikan harga minyak mentah hingga 34%. Pada saat itu, inflasi di tingkat 9-10%, dan Bank Indonesia (BI) harus mengubah kebijakan moneternya untuk menghentikan kenaikan tersebut.

Salah satu peristiwa paling penting yang berdampak pada inflasi di Indonesia adalah krisis moneter Asia tahun 1997 - 1998. Situasi di dalam negeri semakin memburuk karena ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Akibat depresiasi tajam rupiah, yang turun dari Rp2.500 menjadi lebih dari Rp15.000 dalam waktu kurang dari satu tahun, inflasi melonjak hingga 77,6% pada tahun 1998. Ketidakpastian pasar meningkat karena ketidakstabilan politik di dalam negeri, seperti demonstrasi besar - besaran dan jatuhnya rezim Orde Baru. Harga beras dan minyak goreng naik lebih dari dua kali lipat, menyebabkan keresahan sosial yang meluas. Meskipun BI menindaklanjutinya dengan kebijakan moneter ketat, yang menaikkan suku bunga acuan hingga 70%, ini juga menyebabkan kredit macet, kebangkrutan bisnis, dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Pada awal tahun 2000-an, konflik dalam negeri seperti di Aceh dan Papua menimbulkan keraguan yang terus - menerus yang mengganggu stabilitas ekonomi. Sangat sering, ketegangan yang terjadi di kedua daerah ini mengganggu distribusi barang dan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok di beberapa wilayah. Di sisi global, harga minyak dunia naik tajam sebagai akibat dari ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah dan invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003. Setelah pemerintah Indonesia harus menaikkan harga bahan bakar bersubsidi

hingga 29% pada tahun 2005, mereka menghadapi lonjakan inflasi menjadi 17,11%, yang berdampak besar pada daya beli rakyat miskin di negara itu. Untuk mengelola inflasi dengan lebih efektif, BI memperkenalkan kerangka kerja penargetan inflasi pada tahun yang sama. Kerangka kerja ini memungkinkan pengaturan ekspektasi pasar untuk mengendalikan inflasi.

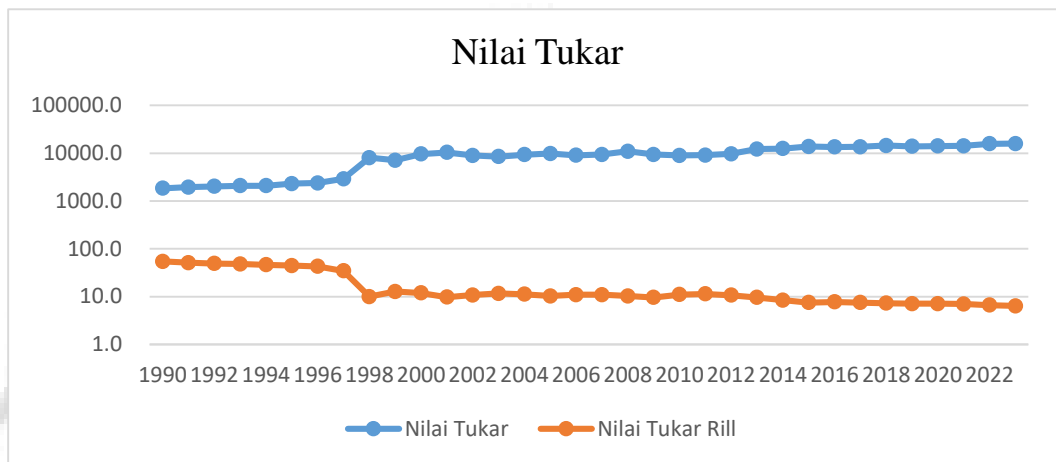
Krisis finansial dunia tahun 2008 adalah peristiwa besar berikutnya yang berdampak pada inflasi di Indonesia. Setelah keruntuhan Lehman Brothers, pasar keuangan global menjadi tidak stabil, yang mengakibatkan pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan inflasi. Karena kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi domestik dan global, inflasi terus meningkat hingga 11% meskipun harga minyak dunia sempat turun karena permintaan global yang melambat. Fokus pada stabilitas politik dan pembangunan infrastruktur selama dekade berikutnya di bawah pemerintahan Joko Widodo membantu menjaga inflasi dalam kisaran 3-5%. Namun, konflik geopolitik seperti perang dagang AS-Tiongkok (2018-2019) meningkatkan tekanan melalui fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan biaya impor bahan baku.

Pandemi COVID-19 dari tahun 2020 – 2023 menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan global, yang diperburuk oleh perang Rusia - Ukraina pada 2022. Konflik ini menyebabkan kenaikan harga makanan dan energi di seluruh dunia pada pertengahan 2022, harga minyak mentah mencapai lebih dari USD 120 per barel. Inflasi di Indonesia meningkat hingga 5,5%, tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi disebabkan utama oleh kenaikan harga energi dan bahan makanan seperti minyak goreng dan gandum. Sebagai tanggapan, pemerintah memberlakukan subsidi energi tambahan. Di sisi lain, BI akan menaikkan suku

bunga acuan secara bertahap pada tahun 2022 dalam upaya mengontrol ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Nilai tukar adalah harga yang disepakati antara dua negara sebagai acuan dalam perdagangan internasional, yang menentukan berapa banyak satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Nilai tukar dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai tukar riil dan nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal menunjukkan perbandingan antara mata uang dua negara, yaitu berapa banyak satu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lainnya (Mankiw, 2006). Nilai tukar yang stabil serta kebijakan moneter yang terkendali membantu menjaga inflasi dalam batas wajar, meskipun tekanan dari volatilitas harga energi dan dampak eksternal lainnya terus menjadi perhatian. Teori paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) merupakan dasar dalam teori nilai tukar yang menjelaskan bagaimana pergerakan kurs dipengaruhi oleh perbedaan tingkat harga di masing - masing negara. Konsep utama dalam teori ini adalah **hukum satu harga** (*The Law of One Price*), yang menyatakan bahwa dalam kondisi pasar yang bebas tanpa hambatan perdagangan atau biaya transportasi, barang yang sama akan memiliki harga yang setara di berbagai negara jika dikonversikan ke dalam mata uang yang sama. Dengan demikian, perjalanan inflasi di Indonesia dari tahun 1990 hingga 2023 mencerminkan interaksi kompleks antara krisis moneter, jumlah uang beredar, nilai tukar, dan kebijakan suku bunga, yang semuanya memainkan peran penting dalam menentukan stabilitas ekonomi negara.

Gambar 1.6 Grafik Nilai Tukar (USD) Indonesia Tahun 1990 - 2023



Sumber data : SEKI Bank Indonesia, 2024

Melalui gambar grafik diatas dapat di lihat sepanjang tahun 1990 hingga 2023 perekonomian Indonesia telah mengalami fluktuasi nilai tukar rupiah yang sangat erat kaitannya dengan inflasi dan kebijakan moneter. Selama Krisis Finansial Asia 1997 - 1998, depresiasi tajam rupiah diikuti oleh lonjakan inflasi yang signifikan akibat meningkatnya harga impor dan pelemahan daya beli masyarakat. Untuk menstabilkan kondisi, Bank Indonesia (BI) menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga, meskipun ini juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Setelah krisis, upaya stabilisasi ekonomi melalui reformasi kebijakan moneter, seperti pengendalian inflasi dan pengelolaan cadangan devisa, membantu menstabilkan nilai tukar pada kisaran Rp8.000 – Rp10.000 per USD pada periode 1999 hingga 2005.

Krisis Keuangan Global 2008 kembali memicu pelemahan nilai tukar dan meningkatkan inflasi, terutama akibat kenaikan harga komoditas global. BI merespons dengan kebijakan moneter ketat untuk menahan dampak inflasi yang didorong oleh pelemahan rupiah. Pada 2013, pengumuman tapering oleh *Federal Reserve* menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, melemahkan rupiah dan

meningkatkan risiko inflasi. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi.

Penurunan harga komoditas pada 2015 menyebabkan depresiasi rupiah lebih lanjut, tetapi inflasi relatif terkendali karena melemahnya permintaan domestik. Kebijakan moneter tetap berfokus pada menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi melalui pengelolaan suku bunga dan intervensi di pasar valas. Saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020, depresiasi rupiah disertai dengan risiko inflasi akibat gangguan pasokan. Namun, BI mempertahankan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menurunkan suku bunga untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Pada periode 2021- 2023, inflasi global yang meningkat dan kebijakan pengetatan moneter oleh bank sentral di negara - negara maju memengaruhi nilai tukar rupiah. BI harus menyesuaikan kebijakan suku bunga untuk menjaga keseimbangan antara mendorong pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan mengendalikan inflasi, sekaligus mempertahankan stabilitas nilai tukar di kisaran Rp14.000 – Rp15.000 per USD. Dengan demikian, hubungan antara fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan kebijakan moneter di Indonesia sangat kuat dan saling mempengaruhi sepanjang periode ini. Berdasarkan hasil dari penelitian (Williamson, 2019) ada pengaruh negative yang signifikan antara nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia yang dapat diartikan bahwa apabila nilai tukar mengalami kenaikan maka Inflasi belum tentu mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian diatas tentunya hal ini semua menjadi kajian yang menarik untuk mengungkap dan mengkaji lebih jauh bagaimana kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi dan saya akan membuat sebuah rangkaian

penelitian yang berjudul "**Analisis Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Di Indonesia**"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Selama periode 1990 hingga 2023, inflasi di Indonesia terus berfluktuasi akibat krisis ekonomi global, krisis moneter, dan perubahan kebijakan nasional. Kenaikan inflasi yang tajam berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan jumlah uang beredar yang tidak terkendali sering kali berkontribusi pada kenaikan inflasi. Ketika jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan pertumbuhan ekonomi riil, harga - harga barang dan jasa cenderung meningkat, yang berpotensi memicu lonjakan inflasi.
3. Suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia berperan penting dalam mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga bisa menekan inflasi dengan mengurangi peredaran uang, tetapi di sisi lain, dapat menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
4. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar AS, sering mengalami fluktuasi yang signifikan. Depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor, sehingga mendorong kenaikan harga barang dan jasa dalam negeri. Hal ini berpotensi memperburuk tingkat inflasi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Produk Domestik Bruto (PDB) mencerminkan tingkat output dan pendapatan suatu negara. Peningkatan PDB biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pertumbuhan tersebut tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas produksi, hal ini dapat menimbulkan tekanan permintaan yang menyebabkan inflasi. Dengan demikian, perlu dianalisis bagaimana pengaruh PDB terhadap inflasi serta bagaimana hubungan keduanya berjalan dalam konteks perekonomian Indonesia.
6. Ketidakstabilan geopolitik, seperti konflik internasional dan krisis energi, dapat memicu inflasi di Indonesia. Gangguan rantai pasokan dan fluktuasi harga komoditas sering kali menyebabkan kenaikan harga yang sulit dikendalikan, berdampak pada perekonomian nasional.
7. Kebijakan moneter Bank Indonesia, seperti suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum, berperan penting dalam mengendalikan inflasi. Namun, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh respons perbankan, dunia usaha, serta dinamika ekonomi domestik dan global.
8. Pandemi COVID-19 awalnya menekan inflasi karena melemahnya permintaan, tetapi pasca pandemi, inflasi melonjak akibat kenaikan harga komoditas dan gangguan rantai pasokan global. Diperlukan kebijakan moneter yang tepat untuk menyeimbangkan pemulihan ekonomi dan stabilitas harga.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian ini berfokus pada lima variabel independen, yaitu jumlah uang beredar (X1), suku bunga (X2), nilai tukar (X3), Produk Domestik Bruto (PDB) (X4) dan ketidakstabilan geopolitik (X5) di Indonesia.
2. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data tahunan dalam kurun waktu 1990 – 2023 (33 tahun).

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh dalam jangka pendek dan panjang variabel jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketidakstabilan geopolitik terhadap inflasi di Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jangka pendek dan panjang variabel jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, Produk Domestik Bruto (PDB), dan ketidakstabilan geopolitik berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia dengan mempertimbangkan faktor jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, PDB, dan ketidakstabilan geopolitik. Penelitian ini memperkuat teori ekonomi moneter yang menekankan peran instrumen moneter dalam

menjaga stabilitas harga serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga, nilai tukar, PDB, dan ketidakstabilan geopolitik terhadap inflasi di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian mengenai efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi.
2. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa/i yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang dinamika inflasi serta faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhinya, khususnya bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang kebijakan moneter.
3. Bagi Universitas, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi ilmiah di perpustakaan Universitas Negeri Medan, khususnya bagi program pascasarjana Ilmu Ekonomi, sehingga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada inflasi dan kebijakan moneter.
4. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi otoritas moneter dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengendalikan inflasi, guna menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



THE
Character Building
UNIVERSITY